



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB 2: PRINSIP DASAR, PRASYARAT KEBERHASILAN DAN STRATEGI UTAMA MP3EI

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disusun dengan mempertimbangan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pada bab ini akan diuraikan juga tiga strategi utama yang merupakan pilar-pilar penting dari MP3EI 2011 – 2025. Sebagai penutup dijabarkan pula pengembangan dan aplikasi prinsip berkelanjutan dalam MP3EI.

A. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

1. Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai suatu dokumen dengan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa, sebagai berikut:

- a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa;
- b. Perubahan pola pikir (*mindset*) dimulai dari Pemerintah dengan birokrasinya;
- c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat;
- d. Mengedepankan posisi dan formasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilandasi nilai-nilai Indonesia sebagai negara maritim;
- e. Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kohesifitas;
- f. Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan;
- g. Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan;
- h. Dunia usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi;
- i. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

Pengusahaan transformasi pembangunan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan yang menyeimbangkan baik pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

a. Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

Dunia Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif dan infrastruktur ekonomi yang menunjang untuk mendukung percepatan dan perluasan investasi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah, berupa:

- 1) Dunia usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- 2) Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global;
- 3) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro;
- 4) Pemerintah didukung oleh birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha;
- 5) Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha;
- 6) Pemerintah memberikan komitmen nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk percepatan penyediaan infrastruktur yang handal;
- 7) Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial;
- 8) Bentuk usaha pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dengan manajemen yang berasaskan keberlanjutan;
- 9) Mendorong integrasi pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan berlandaskan pelestarian lingkungan.

b. Reformasi Kebijakan Keuangan Negara

Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan reformasi, dengan cara pandang dan pendekatan sistem perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi. Tarif Pajak dan Bea Masuk dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi yang sedang dihadapi;
- 2) Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 3) Dilakukan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan seluruh warga negara yang mempunyai pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia dan bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan konsep dari Nasional menjadi Domestik atau dari konsep GNP menjadi GDP);
- 5) Pengenaan pajak diarahkan kepada konsumen akhir, menggantikan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 6) Seluruh aturan perpajakan dievaluasi agar hanya terdapat satu pengertian (hitam atau putih, boleh atau tidak, objek pajak atau bukan objek pajak);
- 7) Dalam rangka meningkatkan daya saing dan upaya untuk mengurangi penghindaran pajak, perlu dilakukan *benchmarking* penentuan besaran tarif pajak dengan negara-negara tetangga;
- 8) Penghindaran pengenaan pajak berganda;
- 9) Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda (*window dressing*), pembebasan atau keringanan pajak tidak dapat dianggap sebagai pajak yang ditanggung negara.

Kebijakan anggaran harus dimulai dengan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang *credible* dan berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

- 1) APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan dasar publik, dan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin;
- 2) Pinjaman pemerintah digunakan untuk pembiayaan investasi dan bukan digunakan untuk belanja rutin. Tingkat pengembalian investasi Pemerintah harus lebih tinggi dari biaya hutang;
- 3) Pengalokasian belanja Pemerintah untuk meningkatkan peran dan minat dunia usaha dalam percepatan dan perluasan penyediaan infrastruktur;
- 4) Prioritasi anggaran Pemerintah untuk penciptaan wirausaha baru untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah subsidi barang menjadi subsidi langsung ke orang miskin. Oleh sebab itu nomor identitas tunggal secara nasional harus segera diwujudkan;
- 6) Hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan lintas generasi, dan bukan sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan;
- 7) Hasil pengelolaan SDA yang terbarukan diinvestasikan untuk peningkatan mutu modal manusia dan teknologi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 8) Perluasan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar;
- 9) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha.

Hal lain terkait reformasi kebijakan keuangan negara adalah diperlukannya reformasi sistem pelaporan kekayaan negara yang meliputi penyusunan arus dana negara dan neraca, harta dan kewajiban, baik yang bersifat keuangan, sumber daya alam, tanah dan bangunan, maupun yang lain. Laporan kekayaan negara tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemberdayaan aset secara efektif dan efisien.

c. Reformasi Birokrasi

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah berupa reformasi yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Menciptakan birokrasi yang efektif, dapat mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung kebutuhan sektor usaha;
- 2) Birokrasi didukung oleh kelembagaan yang kuat dan efektif, menciptakan birokrasi dan administrasi yang rapi, lembaga legislatif yang bertanggung jawab, lembaga yudisial yang independen;
- 3) Menciptakan komitmen kepada penerapan *good governance*;
- 4) Birokrasi dan struktur kelembagaan yang kuat dan efektif harus mampu menjadi saluran umpan balik bagi perencanaan ke depan.

d. Penciptaan Konektivitas Antar Wilayah di Indonesia

Pemerintah menjadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi;
- 2) Identifikasi simpul-simpul transportasi (*transportation hubs*) dan *distribution centers* untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
- 3) Penguatan konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas internasional (*global connectivity*);
- 4) Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.

e. Pemanfaatan Potensi Kemitraan

Pendekatan koridor ekonomi Indonesia juga dilandasi oleh cara pandang Wawasan Nusantara atas pengelolaan aset dan akses dalam bentang wilayah darat dan wilayah perairan teritorial, landas kontinen (*continental shelf*) maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berbasiskan wawasan nusantara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Melekat dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLoC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3).

Pemanfaatan dilakukan dengan:

- 1) Pemanfaatan posisi strategis nasional untuk sebesar-besar menjaga dan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional;
- 2) Pemanfaatan potensi jalur laut untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi secara nasional;
- 3) Peningkatan daya saing jalur laut internasional dan kemaritiman bangsa dengan memanfaatkan jalur SLoC dan ALKI yang dimiliki.

f. Kebijakan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

Ketahanan pangan merupakan prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
- 2) Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;
- 3) Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;
- 4) Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;
- 5) Pembangunan kegiatan investasi pangan baru berskala ekonomi luas Luar Jawa;
- 6) Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Kebijakan terkait penyediaan air bersih tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk;
- 2) Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya;
- 3) Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air;
- 4) Kabupaten/Kota memastikan terciptanya/terjaganya luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ketahanan energi didasarkan kepada manajemen resiko dari kebutuhan dan ketersediaan energi di Indonesia yang meliputi:

- 1) Manajemen resiko didasarkan pada pengaturan komposisi energi (*energy mix*) yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan;
- 2) Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi antar peraturan;
- 3) Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor;
- 4) Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan;
- 5) Memitigasi ketergantungan energi Indonesia (terhadap impor minyak) yang kemudian membebani APBN dengan mendorong pengembangan energi terbarukan;
- 6) Mendorong pemanfaatan sumberdaya energi yang ketersediaannya cukup banyak (batubara) atau energi yang terbarukan;
- 7) Mengembangkan strategi kebijakan harga energi yang mendorong upaya-upaya efisiensi energi dan diversifikasi energi, khususnya ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan;
- 8) Mendorong efisiensi pemanfaatan dan diversifikasi energi pada pembangkit listrik dan terutama sektor-sektor dengan konsumsi energi tinggi.

g. Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Negara bertanggungjawab melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap resiko pembangunan ekonomi, sehingga perlu menyediakan:

- 1) Jaminan sosial berbentuk bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan juga berbentuk asuransi sosial yang bersifat menyeluruh (*universal*) bagi seluruh masyarakat;
- 2) Bantuan sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk subsidi maupun transfer tunai yang terarah kepada kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu;
- 3) Bantuan sosial temporer dapat diberikan jika penduduk menghadapi situasi darurat karena adanya bencana alam, sosial, atau krisis ekonomi;
- 4) Asuransi sosial yang sifatnya *universal* diselenggarakan dengan mengkombinasikan sumber daya di dunia usaha dan juga masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 1) Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin, mencakup pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan dengan kebijakan penyediaan infrastruktur dasar yang dilakukan secara terpadu;
- 2) Perbaikan kapabilitas dan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat termiskin usia produktif;
- 3) Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berdasarkan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
- 4) Peningkatan kualifikasi sumber daya penduduk miskin dan rentan yang berfokus di perkotaan;
- 5) Penciptaan perekonomian yang inklusif, berbasis pemberdayaan kewirausahaan kelompok usaha mikro dan kecil yang berbasis di perdesaan;
- 6) Penciptaan lapangan pekerjaan yang secara langsung mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan mendorong investasi yang mendukung langsung pembangunan berkelanjutan dan menyiapkan SDM berbasis berkelanjutan;
- 7) Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal;
- 8) Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha.

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu:

- 1) Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;
- 2) Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 3) Pemerintah pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah.

Usaha penanggulangan kemiskinan dan penyediaan jaminan sosial akan dielaborasi lebih mendalam dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

h. Mitigasi Perubahan Iklim untuk Memastikan Keberlanjutan Pembangunan

Pembangunan yang berkelanjutan juga memastikan keberlanjutan lingkungan sebagai ekosistem utama manusia, lebih jauh, Indonesia memiliki peran besar pada skala internasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di dunia:

- 1) Mengusahakan pengurangan resiko bencana, seperti dengan melakukan bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia;
- 2) Penyesuaian perencanaan infrastruktur dan desain terhadap dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim sebagai bentuk penguatan adaptasi bangsa;
- 3) Pengembangan ekonomi rendah emisi karbon (*low carbon economy*) sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serendah mungkin;
- 4) Pengembangan kapasitas dan peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia;
- 5) Memastikan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan agar memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi emisi GRK serta untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim.

B. Strategi dalam MP3EI

1. Peningkatan Koridor Ekonomi

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Pendekatan ini pada intinya merupakan intergrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

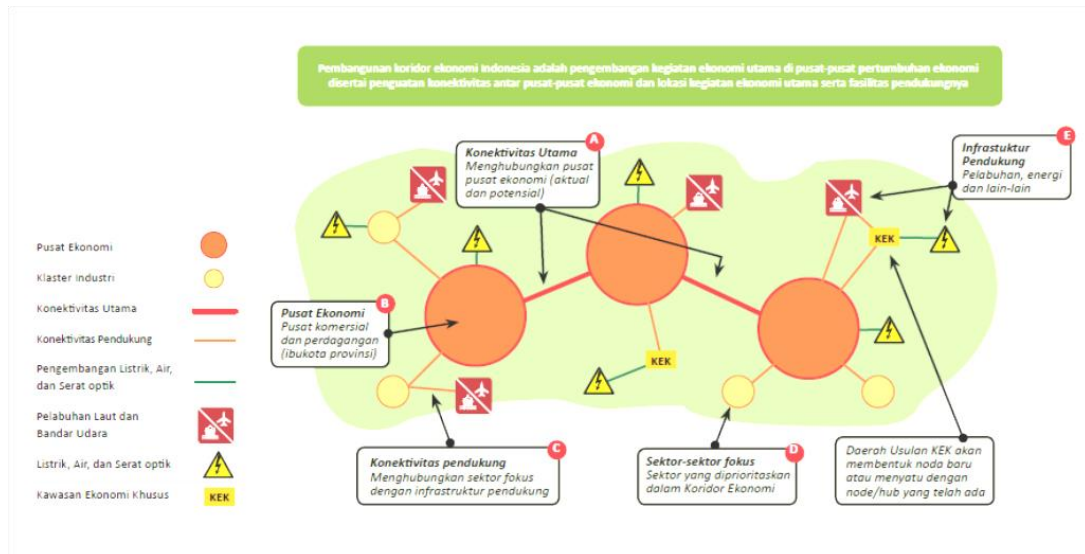


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Gambar 2.1

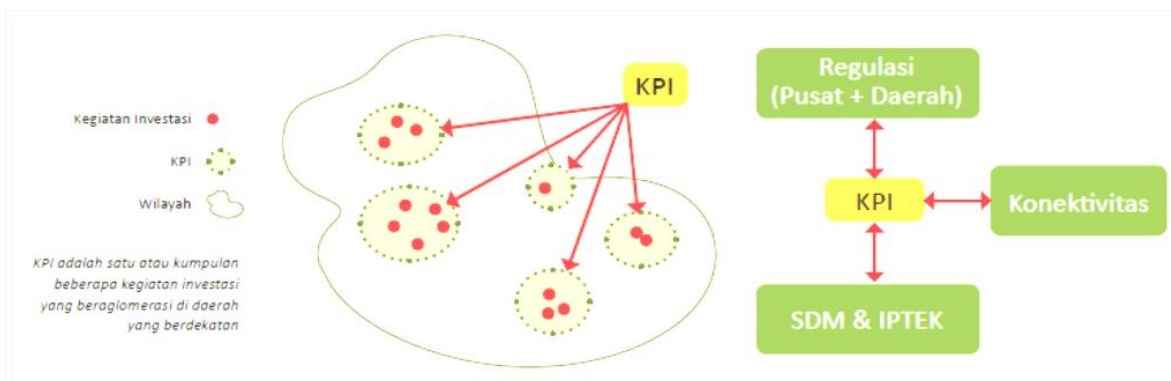
Ilustrasi Koridor Ekonomi



Penciptaan kawasan ekonomi dituangkan dalam konsep Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang menjadi alat dalam pengambilan kebijakan pada MP3EI. KPI adalah satu atau kumpulan beberapa kegiatan investasi yang beraglomerasi di daerah yang berdekatan. Lokasi-lokasi KPI pada masing-masing koridor perlu diidentifikasi untuk acuan pengembangan infrastruktur (konektivitas), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kemampuan teknologi/inovasi, serta identifikasi kebutuhan fasilitasi penyempurnaan regulasi. Melalui kebijakan KPI ini diharapkan pengembangan infrastruktur, SDM dan teknologi, serta fasilitasi regulasi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari setiap kegiatan investasi.

Gambar 2.2

Ilustrasi Kawasan Perhatian Investasi (KPI)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Penguatan dan penyediaan konektivitas antar dan intra pusat ekonomi didasarkan pula pada dokumen-dokumen hukum terkait, rencana tata ruang nasional serta daerah, RAN-GRK, RPPLH, dan dilakukan dengan prosedur dan standar pemenuhan dokumentasi yang seharusnya.

Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi pada penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru, perlakuan khusus dapat diberikan pada kawasan tersebut untuk mendukung pembangunannya. Terlebih pada kawasan yang berlokasi di luar Jawa, terutama kepada dunia usaha yang bersedia membiayai pembangunan sarana pendukung dan infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang yang mendorong internalisasi pemanfaatan sumber daya di Indonesia, guna tercapainya keberlanjutan dalam pembangunan pada dan di sekitar pusat pertumbuhan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu bentuk usaha pengembangan pusat ekonomi dengan memberikan perlakuan khusus yang dilandasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 pada suatu kawasan industri yang ditentukan berdasarkan suatu peraturan pemerintah.

Kegiatan investasi yang menjadi fokus MP3EI merupakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat memberi dampak secara masal. Dengan demikian MP3EI tidak dapat mengesampingkan *supply chain* yang melekat pada kegiatan investasi tersebut, terutama pada bentuk usaha dengan skala lebih kecil – UMKM. Dukungan dalam pengembangan UMKM dalam basis KPI – Koridor – Nasional perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan investasi yang menjadi fokus utama. Saat ini 97,2 persen dari bentuk usaha di Indonesia merupakan UMKM, dan berkontribusi atas 99 persen lapangan pekerjaan. Namun, nilai investasi keseluruhan hanya mencapai 48 persen dan memberi kontribusi nilai tambah sebesar 57 persen. Hal ini menunjukkan UMKM memiliki potensi besar untuk pemerataan pembangunan dan mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dalam industri di Indonesia.

Pengembangan investasi utama yang selaras dengan pengembangan UMKM sebagai rekan utama akan membentuk iklim bisnis yang berkelanjutan. Dukungan pada UMKM berupa:

- 1) Pengembangan kebijakan pembiayaan yang lebih ramah terhadap usaha pengembangan UMKM, terutama yang terkait dengan potensi KPI/Koridor;
- 2) Perbaikan kemampuan teknologi adaptasi UMKM, serta pengembangan teknologi yang dibutuhkan UMKM;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- 3) Terbangunnya sistem konektivitas yang inklusif antara kegiatan investasi utama dengan UMKM terkait;
- 4) Pengembangan SDM bagi UMKM guna meningkatkan daya saing hasil produksi.

Pendekatan koridor pada MP3EI merupakan bentuk integrasi kegiatan ekonomi berbasis darat dan aspek kemaritiman Indonesia. Wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah lautan, dengan luas 3,2 juta km² dari 5,2 juta km² luas keseluruhan wilayah Indonesia. Dalam pendekatan koridor MP3EI pemanfaatan wilayah maritim akan berfokus pada pemanfaatan sistem logistik – konektivitas dan optimalisasi produk kelautan.

Pemanfaatan sistem logistik dilakukan dengan melihat potensi dan posisi geografi Indonesia. Gerbang masuk Indonesia pada koridor lautnya dimanfaatkan oleh MP3EI dengan membuka ribuan kilometer “jalur bebas” dengan mengintegrasikan sistem logistik yang fokus pada jalur laut sebagai jalur nasional dan internasional. Terintegrasi dengan dunia, dimana pelayaran internasional dianggap berkontribusi pada pilar pembangunan berkelanjutan. Pelayaran merupakan sistem transportasi skala besar yang paling aman, efisien dan ramah lingkungan (Ekonomi Hijau dalam laporan *World Blue*, UNEP, 2012). Kemudian, optimalisasi produk kelautan dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu (1) pemetaan kawasan potensial dan penetapan kawasan percontohan; (2) pengembangan KPI berbasis industri kelautan sebagai penggerak utama ekonomi kawasan; (3) penataan sistem manajemen sumberdaya kelautan dan perikanan yang secara ekonomi dan kelautan menguntungkan.

Pembangunan koridor ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi wilayah sebagai berikut:

1. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.
2. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah.
3. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun global.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

4. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah.
5. Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari pemerintah pusat maupun daerah;
6. Koridor Ekonomi Indonesia mengintegrasikan pengembangan usaha berskala besar, menengah, kecil, dan mikro demi memastikan pembangunan yang *pro-poor*, *pro-growth*, dan *pro-job*;
7. Koridor Ekonomi Indonesia memastikan pengembangan wilayah laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangannya koridor ekonomi itu sendiri dan termasuk pula usaha optimalisasi wilayah laut sebagai jalur logistik.

Pada akhirnya pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia dengan KPI sebagai alat perencanaan, dilakukan untuk mempermudah penciptaan keterpaduan pembangunan pada kawasan. Keterpaduan yang dilihat dari keselarasan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dilakukan dengan mengintegrasikan jenis investasi dan sistem produksi dan keterpaduan kebijakan/regulasi baik pusat maupun daerah, maupun lintas sektor.

2. Penguatan Konektivitas Nasional

Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT), dalam kerangka dan cara pandang Wawasan Nusantara. Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang berkemandirian, berdaya saing dan berkedaulatan.

Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global/internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

1. Unsur Pengelolaan Mobilitas dalam Konektivitas Nasional

Konektivitas Nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suatu bangsa dalam mengelola mobilitas yang mencakup 5 (lima) unsur sebagai berikut:

- a. Personel/penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia di, dari dan ke wilayah;
- b. Material/barang abiotik (*physical and chemical materials*) yang menyangkut mobilitas energi, sumber daya air, dan komoditi hasil industri;
- c. Material/unsur biotik/species, yang mencakup lalu lintas unsur makhluk hidup di luar manusia seperti ternak, *Bio Toxins*, *Veral*, *Serum*, *Verum*, *Seeds*, *Bio-Plasma*, *BioGen*, *Bioweapon*;
- d. Jasa dan Keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi, sumber daya manusia dan modal pembangunan bagi wilayah.
- e. Informasi, yang menyangkut mobilitas informasi untuk kepentingan pembangunan wilayah yang saat ini sangat terkait dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan pengelolaan mobilitas terhadap lima unsur tersebut di atas akan meningkatkan kemampuan nasional dalam mempercepat dan memperluas pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

2. Garis Depan Konektivitas Global Indonesia

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang menseksamai landas posisi geo-strategis Wawasan Nusantara, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan ALKI tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

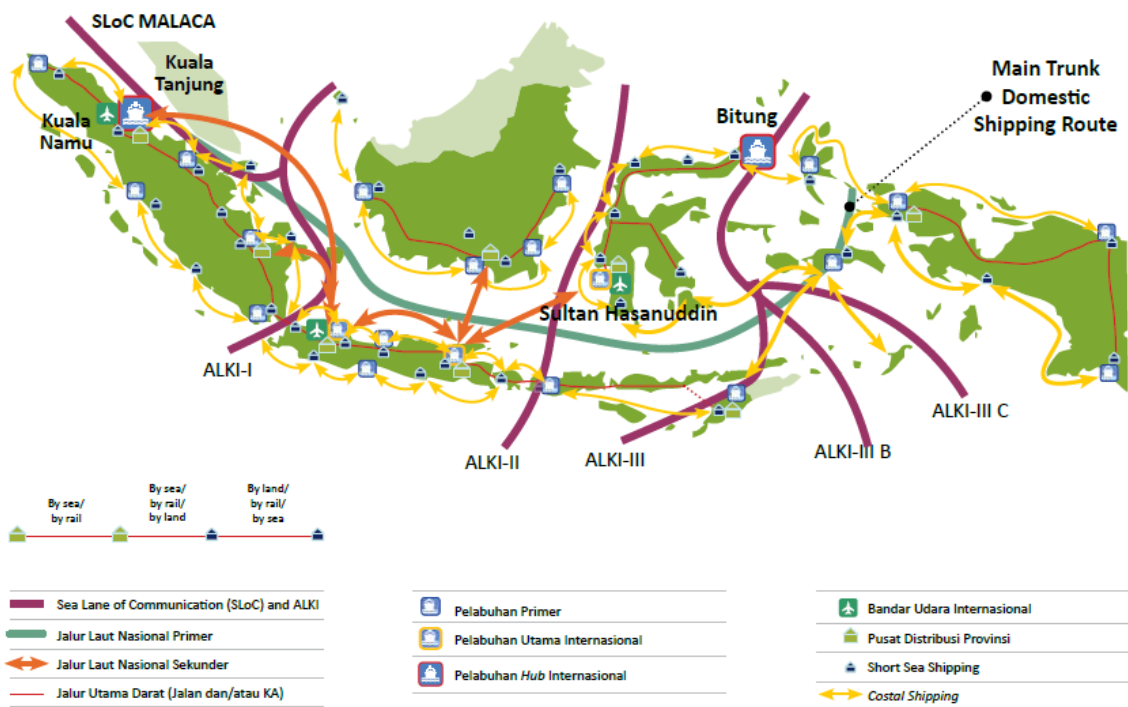
Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid. Untuk itu telah ditetapkan pembangunan pelabuhan hub internasional bagi Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dan untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung, Sulawesi Utara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Gambar 2.3
Konsep Gerbang Pelabuhan dan
Bandar Udara Internasional di Masa Depan



Infrastruktur strategis di Luar Pulau Jawa dapat mendorong terbangunnya industri di wilayah depan, baik industri yang memproduksi barang kebutuhan domestik maupun ekspor. Hal ini tentunya juga akan membantu terwujudnya mekanisme sumber muatan balik (*back haulage cargo*), dimana keseimbangan muatan transportasi laut dan transportasi udara nasional dapat memfasilitasi dan menjadi jembatan bagi pergerakan barang dan orang dari Wilayah Timur ke Wilayah Barat dan dari Wilayah Depan ke Wilayah Dalam.

Keseimbangan muatan antar wilayah akan meningkatkan *load factor* bagi sistem transportasi. Hal ini akan mendorong terjadinya penguatan Sistem Transportasi Nasional dan mendukung terciptanya Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien.

Disamping itu, dalam upaya meningkatkan daya saing logistik Indonesia, pemerintah melakukan pengembangan pelabuhan *short-sea shipping* di wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Timur sebagai bentuk alternatif pengembangan infrastruktur jalan raya, yang dikenal dengan konsep *short sea shipping*. Pengembangan konsep ini juga bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

1. Kepadatan jalur transportasi darat, terutama di pantai utara Pulau Jawa dan jalur lintas Sumatera sudah sangat mengkhawatirkan dan mengakibatkan kerusakan jalan raya serta resiko kecelakaan menjadi tinggi;
2. Biaya BBM angkutan jalan tinggi, secara teoritis konsumsi BBM per unit barang yang diangkut oleh truk lebih tinggi dibandingkan penggunaan BBM per unit barang yang diangkut oleh kapal (*economy of scale*).

Penerapan konsep utama *short sea shipping*, sebagai bentuk peningkatan daya saing secara mikro adalah dengan pembangunan konektivitas lokal, antar pulau, dan nasional secara terintegrasi dengan mengembangkan jalur pelayaran dan operasional pada jalur *short sea shipping* secara terjadwal. Konsep *short sea shipping* kemudian dijabarkan sebagai pengangkutan komoditas/barang menggunakan sarana pengangkutan laut (kapal laut) menyusuri garis pantai sejauh 10 mil sampai dengan 20 mil laut dan antar pulau dari pelabuhan asal hingga pelabuhan tujuan.

Pengembangan hub internasional sebagai pelabuhan logistik utama dilakukan dengan mengintegrasikan keseluruhan sistem logistik berbasis kelautan di Indonesia secara makro. Dengan tujuan utama untuk mencapai efisiensi biaya logistik, rute pelayaran diatur Barat-Timur ulang alik dengan ukuran kapal yang besar. Kedua pendekatan ini dilakukan secara sinergis untuk mempercepat peningkatan daya saing sistem logistik kemaritiman bangsa. Sehingga, menciptakan reformasi angkutan laut yang bersifat komperhensif dan terintegrasi dengan meliputi empat komponen utama yaitu:

- 1) Pengembangan prasarana (infrastruktur) pelabuhan;
- 2) Peningkatan sarana (kapal) angkutan laut;
- 3) Pembenahan sistem manajemen pelabuhan dan pelayaran;
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi laut.

3. Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas

Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal *supply chains systems*;
- b. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*);
- c. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling berhubungan ke dalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional (Gambar 2.4). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut.

Gambar 2.4

Visi Konektivitas Nasional

Komponen Pembentuk Postur Konektivitas Nasional			
SISLOGNAS	SISTRANAS	PENGEMBANGAN WILAYAH (RPJMN dan RTRWN)	ICT
1. Penentuan <i>Key Commodities</i>	1. Keselamatan Transportasi	1. Peningkatan Ekonomi Lokal	1. Migrasi Menuju Konvergensi
2. Penguatan Jasa Logistik	2. Pengusahaan Transportasi	2. Peningkatan Kapasitas SDM	2. Pemerataan Akses dan Layanan
3. Jaringan Infrastruktur	3. Jaringan Transportasi	3. Pengembangan Infrastruktur	3. Pengembangan Jaringan <i>Broadband</i>
4. Peningkatan Kapasitas SDM	4. Peningkatan SDM dan Iptek	4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	4. Peningkatan Keamanan Jaringan & Sistem Informasi
5. Peningkatan ICT	5. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup	5. Peningkatan Akses Modal Kerja	5. Integrasi Infrastruktur, Aplikasi & Data Nasional
6. Harmonisasi Regulasi	6. Penyediaan Dana Pembangunan	6. Peningkatan Fasilitas Sosial Dasar	6. Peningkatan e-Literasi, Kemandirian Industri ICT Domestik dan SDM ICT Siap Pakai
	7. Peningkatan Administrasi Negara		7. Peningkatan Kemandirian Industri ICT Dalam Negeri

Wawasan Nusantara

Gambar 2.5

Visi Konektivitas Nasional





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Hasil dari pengintegrasikan keempat komponen konektivitas nasional tersebut kemudian dirumuskan visi konektivitas nasional yaitu 'TERINTEGRASI SECARA LOKAL, TERHUBUNG SECARA GLOBAL (*LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED*)'.

Yang dimaksud *Locally Integrated* adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan *inter-moda* transportasi, komunikasi dan informasi serta logistik.

Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana *inter-moda* transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (*virtual*) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (*origin*) sampai dengan titik tujuan (*destination*).

Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tentunya akan meningkatkan kegiatan/aktivitas pada suatu wilayah atau nodal, dan seringkali hal ini merubah ciri wilayah kearah perkotaan. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memproyeksikan hingga tahun 2030 sekitar 90 persen dari kota-kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen atau diatas pertumbuhan nasional akan berada di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya, pengembangan sistem transportasi perkotaan perlu menjadi bagian dari pengembangan sistem konektivitas nasional untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Dalam rangka percepatan pembangunan Broadband, pada tanggal 20 Juni 2013 Pemerintah telah meluncurkan Konsultasi Publik “Indonesia Broadband Plan (IBP)” yang merupakan dokumen kebijakan rencana pengembangan sektor TIK, khususnya pengembangan broadband (Internet Pita Lebar) di Indonesia. Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana induk pembangunan Konektivitas Nasional, yang merupakan salah satu pilar pembangunan nasional dalam MP3EI. Diharapkan dengan rencana induk ini, pembangunan sektor TIK di Indonesia bisa optimal, sehingga target menjadi Negara berpendapatan tinggi di tahun 2025 bisa tercapai.

Percepatan pengembangan transportasi perkotaan juga perlu dilakukan untuk menguatkan integrasi lokal dalam sistem konektivitas. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan peran-peran tertentu pada wilayah, dimana wilayah perkotaan berperan sebagai pusat ekonomi dan wilayah perdesaan sebagai pusat produksi. Pengembangan sistem transportasi perkotaan ini tentunya beracuan pada kerangka pemikiran modern yang unggul, dengan mempertimbangkan berbagai pilihan moda-moda transportasi dan meninggalkan pendekatan konvensional yang berfokus pada sirkulasi kendaraan dan manusia secara eksisting.

Sedangkan yang dimaksud *globally connected* adalah sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu internasional pada pelabuhan dan bandara (*international gateway/exchange*) termasuk fasilitas *custom* dan *trade/industry facilitation*.

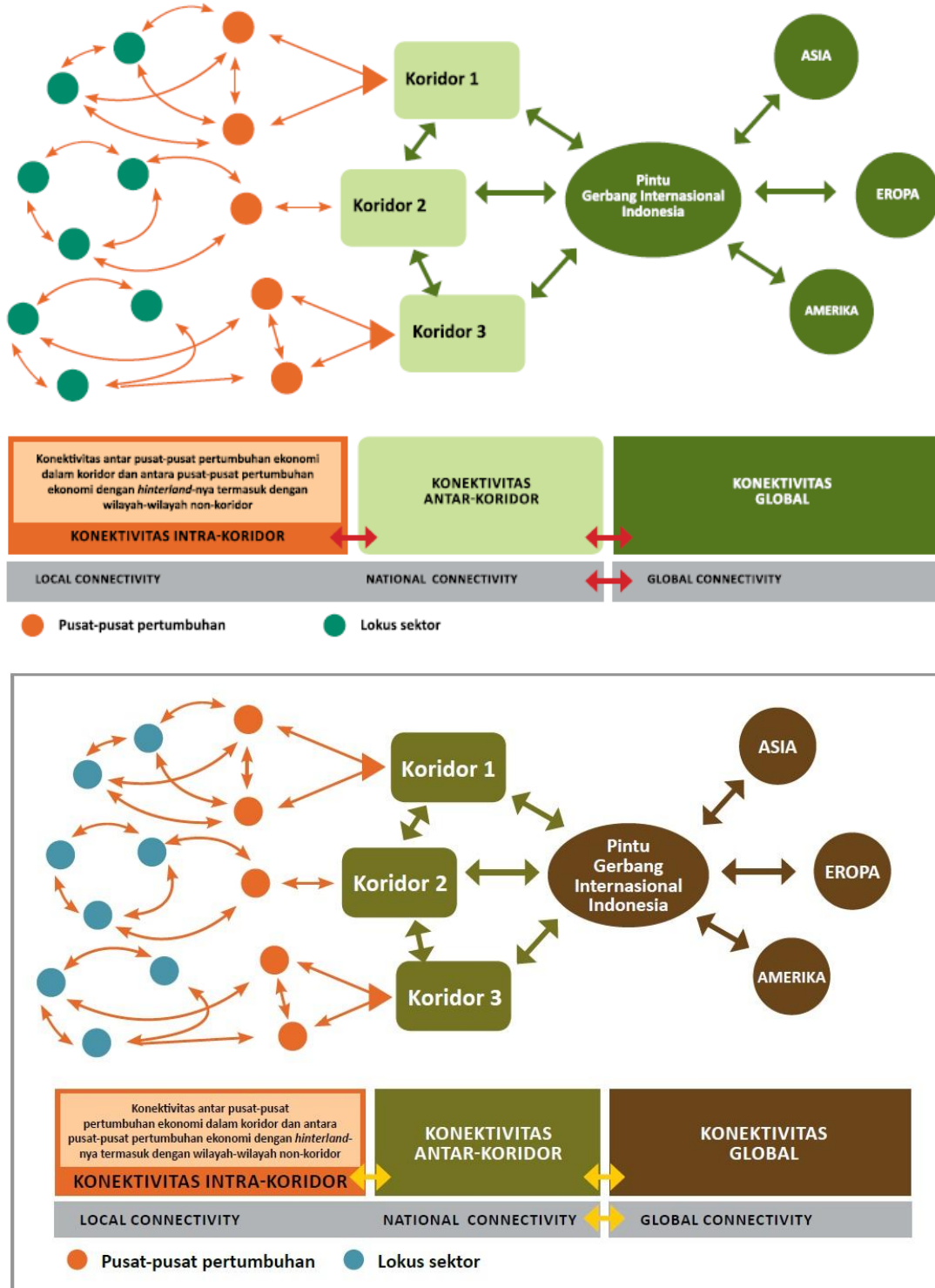
Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi *globally connected* tersebut. sehingga untuk mewujudkannya diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara. (Gambar 2.6)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Gambar 2.6
Kerangka Kerja Konektivitas Nasional





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama sebagai berikut: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Fokus Penguatan Konektivitas Nasional untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

KONEKTIVITAS INTRA - KORIDOR EKONOMI	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas di dalam koridor.• Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana perkeretaapian penumpang dan barang• Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung (pelabuhan, energi) dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah-wilayah non koridor ekonomi.• Merevitalisasi angkutan penyeberangan, pelabuhan lokal serta optimalisasi pelayaran perintis dan mekanisme PSO• Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis• Pembangunan jaringan ekstension <i>backbone</i> hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama• Pemerataan akses infrastruktur hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama beserta penguatan jaringan <i>backhaul</i>• Pengembangan jaringan <i>broadband</i> terutama <i>fixed broadband</i>• Pengalokasian spektrum frekuensi radio yang memadai• Implementasi infrastruktur sharing termasuk untuk infrastruktur pasif (menara, pipa, tiang, <i>right of way</i>) dengan operator non-telekomunikasi• Penggunaan <i>green technology equipment</i> untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah non komersial• Pembangunan Nasional/Nusantara <i>Internet Exchange</i> di pusat-pusat pertumbuhan
KONEKTIVITAS ANTAR KORIDOR EKONOMI	<ul style="list-style-type: none">• Memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif antar-koridor ekonomi untuk daya saing regional dan global• Menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang dan jasa antar koridor ekonomi• Penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan dan bandara utama sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi (<i>integrated logistic port management</i>).• Pengembangan interkoneksi antara pelabuhan utama (pusat koleksi dan distribusi) dengan pelabuhan lokal dan pelabuhan <i>'hub'</i> internasional• Pengintegrasian multi moda <i>backbone</i> (serat optik, satelit, <i>microwave</i>)• Penguatan infrastruktur <i>backbone</i> serat optik: pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, dan pengintegrasian dengan pelayanan di koridor ekonomi wilayah barat• Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pengembangan sistem inaportnet pada pelabuhan regional
KONEKTIVITAS INTERNASIONAL	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan dan menetapkan pelabuhan dan bandara sebagai <i>'hub'</i> internasional di Kawasan Barat dan Timur Indonesia• Optimalisasi pengoperasian sistem <i>National Single Window</i> (NSW) di pelabuhan dan bandara yang berfungsi sebagai <i>'hub'</i> internasional melalui peningkatan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka penerapan <i>Customs Advance Trade System</i> (CATS) dan NSW serta terkoneksi sistem jaringan logistik nasional (<i>national supply chain</i>) dengan sistem jaringan logistik ASEAN (<i>ASEAN supply chain</i>) dan sistem jaringan logistik global (<i>global supply chain</i>) pada pelabuhan dan bandara internasional.• Peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara internasional dengan menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi (<i>integrated logistic port management system</i>).• Membuka <i>link/international gateway</i> baru ke luar negeri sebagai alternatif <i>link</i> yang ada• Pembangunan <i>international exchange</i> di pusat-pusat pertumbuhan• Mempersiapkan diri dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana konektivitas regional dan global untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada 2013, integrasi pasar ASEAN pada 2015, dan integrasi pasar global pada 2020.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Guna mendukung pelaksanaan MP3EI, langkah percepatan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan demi optimalisasi potensi dan meningkatkan *multiplier effect* dari masterplan ini. Investasi infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan (kini mencapai 4 persen - 5 persen dari GDP), sedangkan target Indonesia untuk meningkatkan *competitiveness index* setidaknya investasi infrastruktur tiap tahunnya harus mencapai angka kontribusi 7 persen dari GDP. Bandingkan dengan investasi infrastruktur di China dan India yang mencapai 8 persen - 10 persen dari GDP.

Prioritas penyediaan infrastruktur perlu dilakukan untuk memastikan investasi infrastruktur yang terbatas benar-benar dialokasikan untuk membiayai infrastruktur yang dapat mempercepat dan memperluas pembangunan di Indonesia. Prioritas infrastruktur diberikan dengan menilai manfaat dari infrastruktur secara lokal maupun nasional, secara ekonomi dan sosial, serta dampak lingkungan dari pengembangan proyek infrastruktur tersebut.

Untuk mengejar percepatan pembangunan Indonesia, investasi infrastruktur tidak dapat hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Pemerintah akan mendorong peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Peran utama pemerintah dalam KPS adalah sebagai fasilitator, peran baru dimana pemerintah diharapkan dapat menyusun skema KPS yang efektif bagi suatu proyek dan berkomitmen dalam mendukung keberlangsungan proyek KPS tersebut.

Pada tataran regional dan global terdapat perkembangan kerjasama lintas batas yang perlu diperhatikan terutama adalah komitmen kerjasama pembangunan di tingkat ASEAN dan APEC. Indonesia perlu mempersiapkan diri mencapai target integrasi bidang logistik ASEAN pada tahun 2013 dan integrasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015, sedangkan dalam konteks global WTO perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi pasar bebas global tahun 2020. Mencermati ketertinggalan Indonesia saat ini, penguatan konektivitas nasional akan memastikan terintegrasinya Sistem Logistik Nasional secara domestik, terhubungnya dengan pusat-pusat perekonomian regional, ASEAN dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global (*regionally dan globally connected*).

Salah satu dari upaya tersebut, penguatan konektivitas nasional perlu diintegrasikan dengan perkembangan kerjasama pembangunan di tingkat ASEAN yang memiliki tujuan:

- a. Memfasilitasi terbentuknya aglomerasi ekonomi dan integrasi jaringan produksi;
- b. Penguatan perdagangan regional antar negara ASEAN;
- c. Penguatan daya tarik investasi dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar anggota ASEAN dan antar ASEAN dengan negara-negara di dunia.



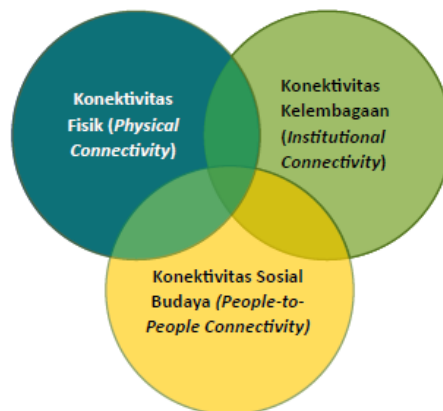
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Upaya di atas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pergerakan komoditas (barang, jasa, dan informasi) secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan bagian dari konektivitas internasional. Elemen-elemen utama penguatan konektivitas ASEAN terdiri dari:

Gambar 2.7

Elemen Utama Penguatan Konektivitas ASEAN



Pelaksanaan integrasi konektivitas nasional dengan konektivitas ASEAN perlu dilakukan dengan semangat kerjasama pembangunan yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan antar negara-negara ASEAN.

a. Konektivitas Fisik (*Physical Connectivity*)

- 1) Transportasi;
- 2) Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- 3) Energi.

b. Konektivitas Kelembagaan (*Institutional Connectivity*)

- 1) Fasilitasi dan liberalisasi perdagangan;
- 2) Fasilitasi dan liberalisasi perdagangan investasi dan jasa;
- 3) Kerjasama yang saling menguntungkan;
- 4) Kerjasama transportasi regional;
- 5) Prosedur lintas perbatasan;
- 6) Program pemberdayaan kapasitas.

c. Konektivitas Sosial Budaya (*People-to-People Connectivity*)

- 1) Pendidikan dan budaya;
- 2) Pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

4. Sistem Logistik Nasional

Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang merupakan salah satu pilar pendukung konektivitas nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang berperan memberikan arah kebijakan dan strategi bagi pengembangan logistik nasional. Bagi pemerintah, Cetak Biru Sistem Logistik Nasional diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan di bidang logistik, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Bagi dunia usaha, Cetak Biru Sistem Logistik Nasional diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dengan biaya yang kompetitif, meningkatkan peluang investasi bagi usaha menengah, kecil dan mikro, serta membuka peluang bagi pelaku dan penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala global.

Langkah pencapaian Cetak Biru Sislognas dirumuskan dalam peta panduan (*roadmap*), rencana aksi (*action plan*) dan tahapan implementasi pengembangan sistem logistik nasional. Implementasi penguatan komponen konektivitas nasional dilaksanakan baik melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik. Khusus untuk sistem logistik nasional, prinsip pelaksanaannya dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dengan mengacu pada *bigwins* dan rencana aksi 6 kunci penggerak utama (*key drivers*) dalam Cetak Biru Sislognas. Selain itu, dalam pengembangan sistem logistik nasional non fisik, peran serta BUMN akan menjadi prioritas.

Gambar 2.8

Tahapan Pengembangan Sistem Logistik Nasional





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Kemudian, pengintegrasian simpul logistik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pergerakan barang dan jasa dari titik asal ke titik tujuan. Integrasi simpul logistik dilakukan baik antara pelaku logistik dan konsumen (*logistics node*) maupun antar jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan (*logistics link*) yang kemudian dapat menghubungkan masyarakat pedesaan, perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antar pulau maupun lintas Negara. Integrasi simpul logistik dan keterkaitan antar simpul ini menjadi salah satu landasan utama dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional.

3 Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional

Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran SDM yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif, yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi di sini terdiri dari program pendidikan akademik, program pendidikan kejuruan, serta program pendidikan profesi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Gambar 2.9

Model Berbagi dan Integrasi Pendidikan Tinggi dan Menengah



Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi. Universitas pusat riset dikembangkan secara nasional sebagai bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan universitas pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, *resource sharing*, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Di Indonesia sendiri, saat ini proporsi SDM dengan latar belakang pendidikan tinggi tergolong rendah. Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi hanya berkisar pada 7 persen (Malaysia 20 persen, OECD 40 persen) sementara pendidikan dasar menjadi mayoritas dengan proporsi 70 persen MP3EI mengusahakan peningkatan proporsi angkatan kerja yang berkualitas, dimana penduduk usia muda didorong untuk setidaknya mengenyam pendidikan hingga menengah atas dan membuka luas kesempatan pendidikan tinggi. Sehingga SDM Indonesia dapat berperan aktif dalam usaha pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.



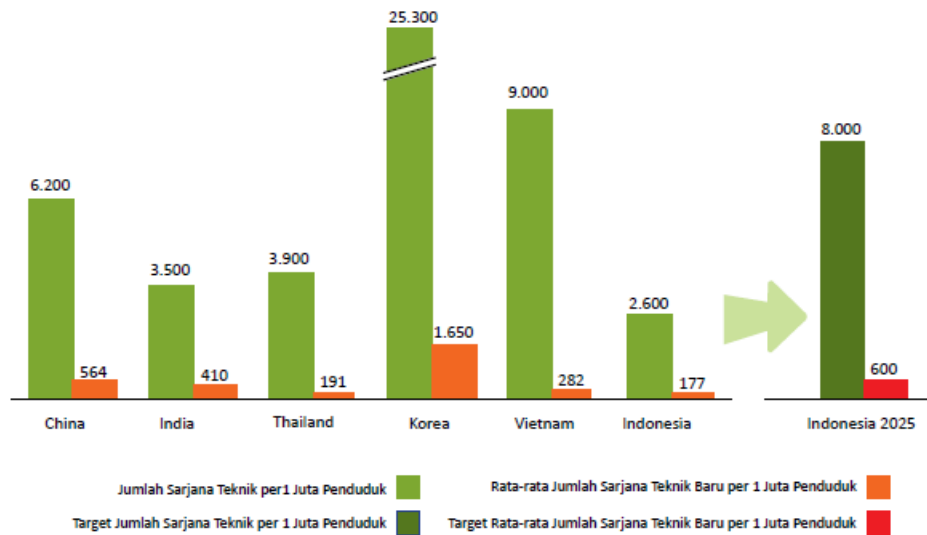
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Penerapan prinsip berkelanjutan dalam pelaksanaan MP3EI dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat kebijakan, rencana dan program, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di tingkat proyek.

Gambar 2.10

Kondisi dan Pertumbuhan Insinyur di Indonesia



Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing-masing koridor ekonomi. Di setiap Kabupaten/Kota minimal harus dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (*community college*) atau politeknik dengan bidang-bidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut. Bersama dengan MP3EI, inisiasi pengembangan *community college* mulai dilakukan dan dikenal dengan Akademi Komunitas. Akademi Komunitas menyelenggarakan program diploma 1, diploma 2 dan diploma 3 yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan Akademi Komunitas dilakukan dengan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha, dan universitas sebagai pengelola Akademi Komunitas. Mutu Akademi Komunitas dibina oleh politeknik yang dikembangkan di ibukota provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi dan keunggulan setiap koridor ekonomi.

Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan pelatihan kerja, dan pengembangan lembaga sertifikasi. Rencana penyediaan pengembangan SDM tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi kebutuhan SDM melalui data investasi MP3EI pada setiap sektor di seluruh koridor dengan pula KPI.



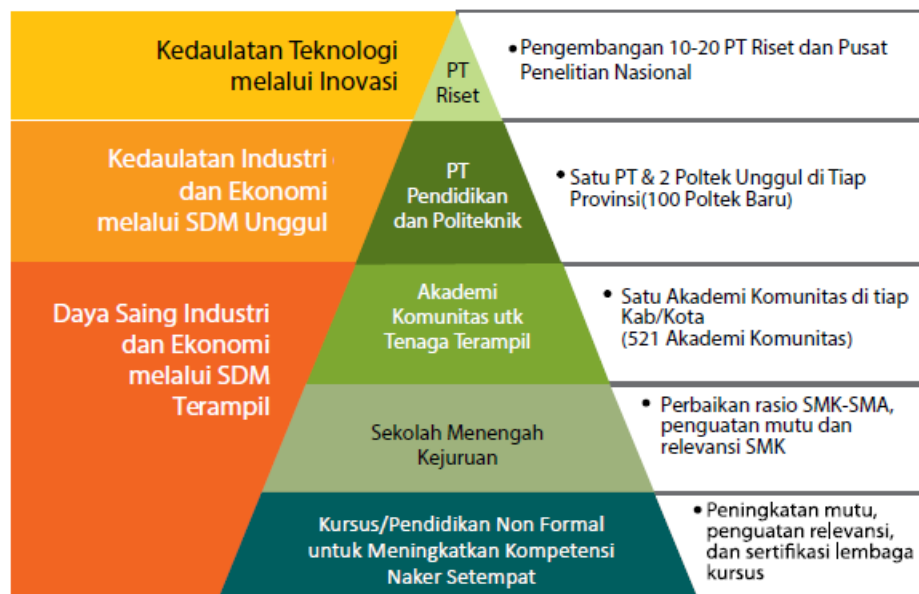
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Kemudian dianalisis menyuluruh dengan KPI lainnya pada tingkat koridor serta nasional. Kemudian analisis penyediaannya akan menggunakan pendekatan kemampuan pelayanan yang lebih administratif, secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Gambar 2.11

Aplikasi Penyediaan Fasilitas Pendidikan



Sumber : Analisis Tim, 2013

Dalam rangka mendukung peningkatan angkatan kerja yang berkualitas, dibuat pendekatan pemenuhan kebutuhan SDM. Pendekatan ini memfokuskan pada sisi kebutuhan SDM pada dunia usaha yang dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu tenaga inovator, tenaga manajerial, dan tenaga terampil. Pemetaan kebutuhan SDM kemudian dilakukan dengan pertimbangan faktor-faktor: (1) pendidikan dan kompetensi; (2) sebaran lokasi industri; (3) sertifikasi keahlian dan keterampilan; (4) jumlah SDM sesuai teknologi; (5) perkembangan pertumbuhan tenaga kerja; (6) situasi sosial setempat.

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada kemampuan bangsa tersebut dalam meningkatkan inovasi. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.



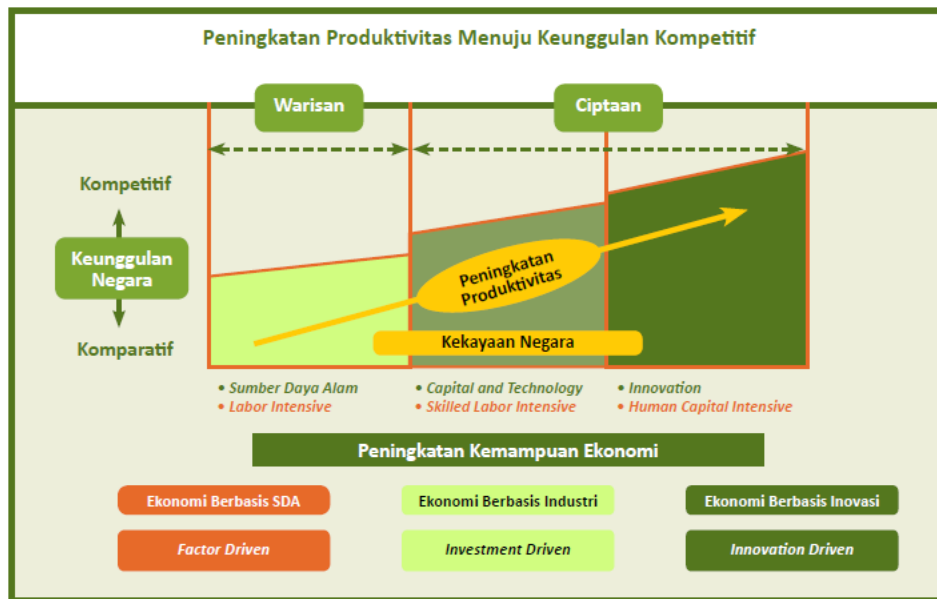
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal dasar untuk dapat menghasilkan sebuah inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global.

Gambar 2.12

Peningkatan Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif



Peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertumpu pada *labor intensive* perlu ditingkatkan secara bertahap menuju *skilled labor intensive* dan kemudian menjadi *human capital intensive*. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap *innovation-driven economies*.

Gambar 2.13

Usulan Inisiatif Inovasi 1-747





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, maka direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 sebagai pendorong utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui penguatan sistem pendidikan (*human capital*) dan kesiapan teknologi (*technological readiness*).

Proses transformasi tersebut memerlukan input pendanaan Penelitian dan Pengembangan (R&D) sebesar 1 persen dari GDP yang perlu terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3 persen GDP menuju 2025. Porsi pendanaan penelitian dan pengembangan tersebut di atas, berasal dari Pemerintah maupun dunia usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 sasaran visi inovasi 2025 di bidang SDM dan IPTEK akan dapat tercapai sehingga menjamin percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Seiring dengan kemajuan ekonomi dari *factor driven economy* menuju ke *innovation driven economy*, diharapkan peran pemerintah di dalam pendanaan R&D akan semakin berkurang dan sebaliknya peran swasta semakin meningkat.

a. Inisiatif Pelaksanaan Inovasi dalam MP3EI

Berikut ini adalah beberapa inisiatif pelaksanaan inovasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi MP3EI:

a. Pengembangan Klaster Inovasi untuk Mendukung 6 (enam) Koridor Ekonomi

Pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi sebagai *centre of excellence* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan *centre of excellence* tersebut diharapkan terintegrasi dengan klaster-klaster industri.

b. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park

Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan S & T Park tersebut perlu dilakukan:

- 1) Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta *link* antara bisnis dan riset;
- 2) Menjadikan PUSPIPTEK sebagai pusat unggulan riset berteknologi tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

c. Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan

MP3EI mendorong dan memberdayakan upaya masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi inovasi pada beberapa produk dan program unggulan wilayah, antara lain:

- 1) Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, di Gresik Utara Provinsi Jawa Timur;
- 2) Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, untuk pengembangan kelapa sawit, kakao, dan perikanan;
- 3) Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi yang berbasis *non-renewable* dan *renewable energy* di Provinsi Kalimantan Timur.

d. Penguatan Aktor Inovasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain:

- 1) Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas;
- 2) Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) yang telah ada, dan menambah 7.000-10.000 Doktor di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2025;
- 3) Pengadaan laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa;
- 4) Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai *best practices* yang sudah dikembangkan di berbagai negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

b. Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional

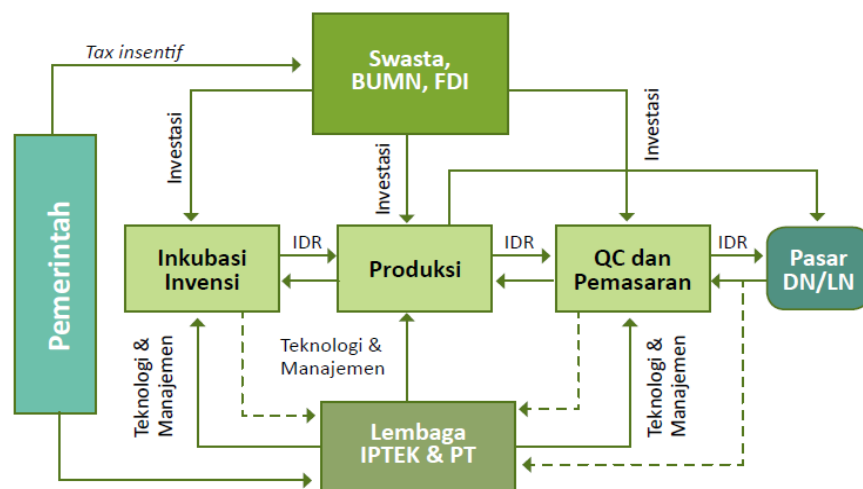
Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu: (a) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator; (b) pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil invensi; dan (c) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi. Kolaborasi ketiga pelaku utama tersebut sangat penting dan diperlukan untuk berkembangnya produk-produk inovasi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka pengembangan inovasi, Pemerintah akan memberikan:

- Insentif fiskal kepada Dunia Usaha (swasta dan BUMN) yang melakukan inovasi, dan perusahaan asing yang menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia;
- Dana penelitian kepada pelaku inovasi dengan syarat bahwa (a) produk inovasi sesuai dengan kebutuhan atau minat pihak industri, (b) produk inovasi tersebut sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas pihak industri yang bersangkutan (*return of investment* yang jelas). Persyaratan ini menjadi penting bagi pengembangan inovasi secara nasional. Pihak industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan informasi *state of the art* kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik.

Gambar 2.14

Penguatan Sistem Inovasi Nasional Indonesia



C. Penerapan Prinsip Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MP3EI

Untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pelaksanaan MP3EI terutama untuk memastikan diperhatikannya daya dukung ekosistem, dilakukan langkah-langkah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a. Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik pada kebijakan MP3EI, koridor ekonomi, maupun pembangunan pusat pertumbuhan. Proses penyusunan KLHS tidak hanya mengidentifikasi potensi dampak MP3EI terhadap daya dukung ekosistem saja, namun juga mengusahakan tercapainya kesepakatan para pihak untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari;
- b. Pembangunan investasi tetap melalui tahap ijin AMDAL;
- c. Dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kegiatan investasi di setiap bidang mengacu pada kebijakan RAN GRK sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN GRK) yang juga telah dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang diterbitkan sebagai peraturan Gubernur.

Gambar 2.15

Penjenjangan dalam Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan



Penerapan prinsip berkelanjutan dalam pelaksanaan MP3EI dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat kebijakan, rencana dan program, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di tingkat proyek.

Penerapan prinsip berkelanjutan dengan menggunakan KLHS dalam pelaksanaan MP3EI memerlukan enam kaidah sebagai berikut:

- a. Kaidah pengarus utamaan pembangunan berkelanjutan, fokus, partisipatif, dan iteratif. Hal ini tercermin dalam proses identifikasi isu-isu strategis dalam MP3EI. Isu-isu yang diidentifikasi terdistribusi berimbang ke dalam dimensi ekonomi, sosial (termasuk kelembagaan), dan lingkungan hidup. tiga kriteria isu strategis yang digunakan adalah: i) memiliki keterkaitan antar sektor, antar wilayah, dan antar generasi; ii) bersifat tidak bisa atau sulit dipulihkan (irreversible), risiko/dampak mencakup jumlah dan luasan yang besar serta umumnya bersifat kumulatif; dan iii) memiliki impilkasi jangka panjang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. Kaidah kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengkajian dampak kebijakan, rencana dan program (KRP) terhadap isu-isu strategis MP3EI memerlukan dukungan data dasar wilayah untuk mendalami karakteristik dampak ataupun risiko lingkungan. Selain itu, implementasi KLHS melalui pendekatan *critical decision factors* dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau tata cara tertentu;
- c. Kaidah terintegrasi dengan KRP lain dan ekonomi hijau. Hasil KLHS yang dilakukan terhadap dokumen MP3EI dapat diintegrasikan dengan KRP lainnya yang relevan sebagai satu upaya pencapaian kepentingan pembangunan ekonomi nasional sesuai tujuan utama MP3EI. Perumusan langkah mitigasi dan alternatif penyempurnaan KRP MP3EI memanfaatkan instrumen kebijakan *green economy* (ekonomi hijau);
- d. Kaidah peningkatan kualitas KRP. Kaidah peningkatan kualitas KRP tercermin dalam rekomendasi perbaikan KRP yang dihasilkan. Setiap alternatif dikaji untuk memastikan bahwa alternatif tersebut dapat mengurangi dampak negatif akibat implementasi KRP dan juga meningkatkan dampak positifnya;
- e. Kaidah tata kelola yang baik. Kaidah ini dipenuhi melalui penerapan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi KLHS. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan telah ditindaklanjuti;
- f. Kaidah pertimbangan karakteristik wilayah dan pertimbangan kebutuhan prioritas wilayah. Perbedaan potensi dan aspirasi masing-masing wilayah pengembangan ekonominya dalam MP3EI menjadi pertimbangan di seluruh tahapan KLHS MP3EI.

Penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan ini juga ditindaklanjuti dengan melihat neraca keberlanjutan dari Indonesia. MP3EI menggunakan WEHAB (*water, energy, health, agriculture, dan biodiversity*) sebagai basis penilaian dari neraca keberlanjutan. Pendekatan WEHAB sendiri digunakan dengan mempertimbangan pelibatan aktif Indonesia dalam berbagai kesempatan internasional terkait pembangunan berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

WEHAB (Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity)

Keterlibatan Indonesia dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) telah menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada pelaksanaannya, WSSD telah menyediakan suatu kerangka kerja WEHAB yang terdiri dari lima aspek yang melekat pada kehidupan manusia, yaitu air (*water*), energi (*energy*), kesehatan (*health*), pertanian (*agriculture*), keanekaragamanhayati (*biodiversity*).

Air merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan air juga merupakan faktor utama dalam mencapai target MDGs yang termasuk diantaranya mengentaskan kemiskinan, mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam kebijakan nasional, meningkatkan akses terhadap air bersih, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Energi merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan sistem energi saat ini tidak konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga perlu reorientasi transisi sistem energi untuk menjadi lebih berkelanjutan yang dapat menjadi perangkat pembangunan berkelanjutan yang efektif.

Kesehatan masyarakat berkontribusi penting dalam memacu produktivitas kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun urbanisasi yang tidak terkontrol dan industrialisasi memicu dampak negatif pada kualitas lingkungan dan sosial. Melalui MDGs dapat mengurangi kesenjangan kesehatan antara negara maju dan berkembang.

Pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Penerapan produksi berkelanjutan selain dapat meningkatkan produktivitas pertanian juga menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, kesuburan tanah dan penggunaan air yang efisien.

Keanekaragaman Hayati merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan berkelanjutan dan kelestarian ekosistem yang mana hal tersebut menjadi syarat utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang